

Revitalisasi Paradigma Wawasan Nusantara sebagai Upaya Menghilangkan Konsepsi Benar-Salah dalam Pemilu

Andrea Hynan Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP

Anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) 2016-2020,
peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 Lemhannas RI

Abstrak

“...average minds discuss events; small minds discuss people” (Eleanor Roosevelt) adalah ungkapan yang menggambarkan realitas sebagai masyarakat Indonesia; setidaknya tergambar dalam kondisi rangkaian Pemilu 2019, suatu “event” (seharusnya) mempromosikan suatu “idea” yang akan membuat kehidupan semakin lebih baik.

Bangsa Indonesia sudah saatnya agar menghindari paradigma “menang-kalah” hingga “benar-salah” (menyalahkan) guna terjaganya keutuhan sarwanusantara atau kesalingterhubungan, kesalingtergantungan, kesalingpedulian sesama manusia Indonesia untuk dapat selalu harmonis, melalui **revitalisasi paradigma wawasan nusantara** dikaitkan dengan cara berpikir *“forward looking”*, agar menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan, guna terjaganya ketahanan nasional.

Kata kunci: wawasan nusantara, pemilihan umum, demokrasi, ketahanan nasional



Sumber: Saracanaday-mix

*“Great Minds discuss idea;
average minds discuss events;
small minds discuss people”¹*
(Eleanor Roosevelt)²

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 telah menyemburkan sejumlah opini yang menunjukkan sebagian realitas masyarakat di Indonesia kebanyakan masih pada tataran *small minds* atau paling tidak *average minds*. Dalam konteks Pemilu 2019, banyak sekali opini bertebaran dari kelompok masyarakat bahkan oknum elit politik yang lebih antusias melakukan *judgment* (dalam hal ini menyalahkan atau membenarkan seseorang) dibandingkan berbicara mengenai kualitas ide atau gagasan atau program yang disajikan oleh mereka yang menjadi “narasumber / pembicara”. Bahkan terkadang, opini-opini tersebut tidak berdasarkan informasi yang valid alias hoaks, ataupun menebarkan kebencian satu diantara lainnya.

Gonjang-ganjing Pemilu 2019³ sudah

terasa bagi publik melalui pemberitaan media-media sejak 2018. Tuduhan dan pembangunan opini negatif antar-kubu menghiasi pemberitaan. Hoaks⁴ dan saling menyalahkan serta ujaran kebencian⁵ menjadi fenomena kemasyarakatan, sehingga antar-anggota keluargapun dapat berselisih karenanya. Hoaks dan ujaran kebencian pun menjadi salah satu Indeks Kerawanan Pemilu 2019, baik versi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)⁶ maupun versi Kepolisian RI (Polri)⁷.

Dalam konteks Pemilu 2019 khususnya pemilihan presiden, ide dan gagasan dirasa sudah bukan sebagai faktor utama dalam opini masyarakat dan pemberitaan media. Kultus atau taklid buta atau fanatisme terhadap individu pasangan calon yang dijagokannya, lebih menyemaraki riuhnya hiruk-pikuk jagad ruang hidup Indonesia. Dampaknya, masyarakat yang tampak euforia untuk memilih menghasilkan dampak positif meningkatnya partisipasi

pemilih⁸, tetapi sekaligus berpotensi menjadi terbelah atau terpolarisasi yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa⁹.

Mengamati fenomena sosial kemasyarakatan yang semakin terkotak-kotak, dan ini terjadi hampir setiap akan menuju hingga pasca hari pemilu, entah pilpres, pileg, pilkada bahkan pilkades ataupun pemilihan-pemilihan pimpinan dalam organisasi atau kumpulan kemasyarakatan. Hal ini juga terbangun sudah lama, bahkan dalam setiap pemilihan, peraih suara terbanyak adalah yang terpilih dan sekaligus dianggap sebagai pemenang beserta pendukungnya disebut sebagai kelompok pemenang. Sehingga terbangunlah paradigma menang-kalah, hingga menular pada pengambilan keputusan dalam seluruh lini kehidupan, bahwa yang benar adalah pemegang suara terbanyak yang juga sebagai pemenang. Sedangkan konsekuensi logisnya, yang salah adalah yang mempunyai suara lebih sedikit dibandingkan yang mendapat suara terbanyak, sekaligus sebagai kelompok yang kalah.

Dampak lebih jauh lagi, akhirnya suara-suara yang saling tendensius menggali-gali kekurangan dan mencari-cari kesalahan dari pribadi-pribadi sangat mewarnai persaingan dan perbedaan dalam kehidupan masyarakat hingga berdemokrasi. Suara nyaring, bersemangat, mencari-cari berbagai sisi negatif dari pihak lainnya yang tidak satu kubu, dijadikan sebagai suatu tema populer yang bergulir liar di masyarakat. Dalam persaingan, membentuk opini-opini tersebut yang tentunya diharapkan oleh satu pihak agar menjadi pertimbangan bagi para pendukung sang pemilih bahkan bagi

kelompok lawannya untuk berpindah kotak memilih kandidat lainnya.

Dari uraian di atas, tampak ada permasalahan dalam paradigma yang berasal dari kesalah-pemanfaatan konsepsi benar-salah. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif)¹⁰. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara/kerangka berpikir atau cara memahami gejala dan fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹¹. Oleh karena itu, paradigma dalam konsepsi menang-kalah yang kemudian menjadi konsepsi benar-salah dalam kehidupan kemasyarakatan hingga demokratis, sangat rentan dan sangat berpotensi menimbulkan perpecahan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan keutuhan NKRI. Nampaknya program atau aksi yang telah dilakukan selama ini, untuk meningkatkan kualitas manusia belum mampu atau bahkan belum terfokus untuk merubah konsepsi menang-kalah atau benar-salah, atau bergerak dari *small mind* menjadi *great mind* setidaknya *average mind*. Konsepsi Wawasan Nusantara yang dilandasi oleh perlunya suatu kesadaran dalam diri seluruh warga negara Indonesia, tentang pentingnya kebersamaan membangun negeri kita tercinta masih perlu di revitalisasi¹², diawali dengan penghilangan konsepsi benar-salah, diantaranya dimulai dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini, wawasan nusantara dipahami sebagai cara pandang bangsa



Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang **sarwanusantara** dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.¹³ Ringkasnya bahwa **wawasan nusantara** adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.¹⁴ Untuk itu dalam konteks pembahasan tulisan ini, bahwa diyakini perlu ada proses dan perbuatan untuk menghidupkan kembali sifat **sarwanusantara**¹⁵ dalam wawasan nusantara, yang berarti bagaimana cara menjaga **keterhubungan** antar sesama manusia Indonesia, antar manusia Indonesia dengan ruang hidup beserta isinya, dan antar manusia Indonesia dengan Tuhan-nya. Salah satunya adalah dengan menghilangkan konsepsi menang-kalah maupun benar-salah dalam cara berpikir dan cara pandang bangsa Indonesia¹⁶.

Cara pandang benar-salah berasal dari cara pandang yang dogmatis¹⁷. Mereka yang sesuai dengan norma atau ajaran yang telah ada terlebih dahulu adalah mereka yang benar, sedangkan mereka tidak sesuai adalah mereka yang salah.

Cara pandang dogmatis ini tidak keliru dalam hal untuk mencapai keteraturan, kepastian, dan ketertiban. Akan tetapi cara pandang dogmatis tidak dapat berjalan sendiri tanpa sifat **sarwanusantara** jika hendak membangun harmonisasi antar manusia Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang lebih dinamis, dalam rangka menjaga keterhubungan maupun kesalingtergantungan untuk menjadikan masyarakat mencapai **“keadaan yang lebih baik”** (lebih bahagia),¹⁸ juga dalam mencapai **“kemanfaatan”**.

Pembentukan opini masyarakat sebagai suatu bentuk rekayasa sosial dalam rangka mempercepat kematangan kerangka berpikir masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam membuat suatu keputusan, tentunya bukan metode yang diharamkan. Masyarakat memang perlu dibiasakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat suatu keputusan. Namun demikian, pembentukan opini itu tentunya perlu lebih diarahkan kepada terjadinya suatu diskusi mengenai bagaimana mewujudkan suatu **“keadaan yang lebih baik”** yang diharapkan terjadi di masa depan (*forward looking*¹⁹). Dalam perspektif tatanan sosial, kesadaran masyarakat yang sudah *“forward looking”*, sama juga seperti kesadaran yang sedang dibangun tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai konsepsi wawasan nusantara.

Para kontestan, pemilih dan pendukung perlu diorientasikan untuk menaruh perhatian dan bersemangat mendiskusikan bagaimana suatu program yang ditawarkan oleh seorang kandidat, dapat masuk akal untuk diwujudkan di

masa depan. Bukan seperti yang terjadi setiap pra-pemilu selama ini, yang mungkin saja oleh sang pembicara tidak diarahkan untuk membangun kebencian dan/atau ketidaksukaan, hanya saja juga tidak mengedukasi bahwa perilaku “*wrong doing*” seperti menyerang, menyalahkan, menuntut, menghakimi pribadi-pribadi antar-kandidat merupakan tindakan yang merusak jaring keterhubungan manusia Indonesia dan berpotensi mengganggu ketahanan nasional.

“*Wrong doing*” juga perlu dipahami bukan semata sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang berujung pada palu hakim, yang ternyata juga tidak pernah dapat membuat semua pihak bahagia, atau menjadikan “keadaan yang lebih baik”²⁰. “*Wrong doing*” perlu lebih dimaknai sebagai robeknya jaringan keterhubungan manusia (dengan manusia lainnya, dengan alam bahkan dengan Tuhan-nya), sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit, yang perlu dipulihkan untuk dapat kembali “seperti” sedia kala²¹. Dunia peradilan, bahkan seringkali menjadi ajang pertarungan turun menurun, kompetisi “menang-kalah”, pertarungan “benar-salah” tanpa melihat akar masalah serta sebab-musabab, yang membibit kebencian dan semakin merobek keterhubungan, kesalingtergantungan, kesatuan sesama manusia Indonesia, atau dengan kata lain **merusak sarwanusantara**.

Peradilan yang memang faktanya hanya berbasis hukum semata, mempunyai kerangka berpikir “*backward looking*”, yang berkhayal mampu mewujudkan keadilan, tetapi secara faktual justru semakin merusak, merobek, melukai

kesalingterhubungan yang harmonis. Akhirnya peradilan, hanya menimbulkan rasa “keadilan” bagi “pemenangnya” dalam menemukan “pembenaran” akan dalil-dalilnya, tanpa harus peduli setidaknya “luka” diantara jaring silaturahmi antar-manusia.

Paradigma lama itu perlu segera ditinggalkan, dan digantikan dengan paradigma yang selaras dengan paradigma wawasan nusantara yang menetapkan pentingnya persatuan dan kesatuan yaitu kerangka berpikir yang memandang bahwa “*wrong doing*” (perbuatan keliru/salah) merupakan perbuatan yang perlu diperbaiki, dijahit, dipulihkan agar sarwanusantara atau kesalingterhubungan, kesalingtergantungan, kesalingpedulian sesama manusia Indonesia dapat selalu harmonis sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Pesta demokrasi merupakan suatu “*event*” mempromosikan suatu “*idea*” yang membuat kehidupan di berbagai sektor semakin lebih baik. Siapa “*person*” yang menjadi kandidat dari “*event*” itu dan siapa “*person*” yang mempromosikan “*idea*” itu sama sekali tidak penting. Bukan siapa orangnya melainkan bagaimana idenya. Dalam kehidupan kemasyarakatan maupun demokrasi seperti pemilu, sudah saatnya manusia Indonesia menghindari cara berpikir serta cara pandang yang sekedar “menang-kalah” hingga “benar-salah” guna terjaganya keutuhan sarwanusantara atau kesalingterhubungan, kesalingtergantungan, kesalingpedulian



sesama manusia Indonesia untuk dapat selalu harmonis, melalui **revitalisasi paradigma wawasan nusantara** dikaitkan dengan cara berpikir "*forward looking*".

Saran

- 1 Dalam merevitalisasi Paradigma Wawasan Nusantara, perlu rencana aksi konkret mengorientasikan seluruh warga negara Indonesia untuk membiasakan kerangka berpikir positif dan "*forward looking*" yang menaruh perhatian "kebutuhan", "kepentingan", "harapan" bersama, yaitu pada bagaimana suatu kondisi yang dikehendaki dapat terwujud di masa depan, dan "kekhawatiran" yaitu pada bagaimana suatu kondisi yang tidak dikehendaki bersama terjadi di masa depan.
- 2 Lemhannas RI perlu segera mengambil alih sedini mungkin untuk memimpin upaya **revitalisasi paradigma wawasan nusantara**, dikaitkan dengan cara berpikir "*forward looking*", dan meninggalkan paradigma "benar-salah" maupun "menang-kalah".
- 3 Seluruh pemangku kepentingan yang berkewenangan mengorientasikan kembali kepada diri dan ruang hidupnya dalam hal terjaminya implementasi hasil dari **revitalisasi paradigma wawasan nusantara** yang telah dikaitkan dengan cara berpikir "*forward looking*" sebagaimana maksud dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rachman. 2019. "Memahami Perbuatan Salah (Dalam Perspektif Pancasila)", slide materi Pelatihan Mediasi Angkatan 103, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta.
- dan Andrea H Poeloengan. 2019. "Paradigma Keadilan Berdasarkan Pancasila (Pendekatan Restorative Justice)", slide materi Pelatihan Mediasi Angkatan 66, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta.
- 2019, "Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Gerakan Pencerdasan Dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila", slide materi Pelatihan Pengenalan Mediasi Baharkam Polri, Pusat Mediasi Nasional, Bogor, 2016
- Bawaslu RI. 2018. "Indeks Kerawanan Pemilu 2019". Bawaslu RI, Jakarta. https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU_IKP_2019.pdf, diakses pada 13 Mei 2019 pukul 22.33 wib.
- BrainyQuote. 2019. "Eleanor Roosevelt"., https://www.brainyquote.com/quotes/eleanor_roosevelt_385439, diakses pada 12 Mei 2019, pukul 23.30 wib.
- Dani Vardiansyah. 2006. "Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar", Indeks, Jakarta
- Div Humas Mabes Polri. 2019. "Analisa dan Evaluasi Pilkada 2018, Prediksi Indeks Potensi Kerawanan Pemilu dan Indeks Potensi Kerawanan Dapil Pemilu Tahun 2019", <https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/>

- jelang-pemilu-2019-rapim-polri-bahas-potensi-kerawanan-dan-pengamanan-menjelang-/2541720212523486/, diakses pada 13 Mei 2019 pukul 22.37 wib
- Howard Zehr. 2015. "The Little Book of Restorative Justice", Good Books, New York.
- Indonesia Lawyers Club. 2019. "Debat Capres 2019 : Menguji Netralitas KPU", <https://www.youtube.com/watch?v=8S6kuCXm7tw>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.56 wib.
- Joglosemarnews. 2019. "Mahfud MD: Banyak Kelirunya, Amien Rais dan Hashim Rusak Pikiran Masyarakat", <https://joglosemarnews.com/2019/04/mahfud-md-banyak-kelirunya-amien-rais-dan-hashim-rusak-pikiran-masyarakat/>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.39 wib.
- Kumparan.com. 2019. "Eleanor Roosevelt dan peran wanita abad ke 20"., <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/eleanor-roosevelt-dan-peran-wanita-abad-ke-20>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 01.48 wib.
- Lono Lastoro Simatupang. 2006. "Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan", Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima. 2018. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima", KBBI V iOS-1.4(15), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI.
- Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara. 2019. "Bahan Ajar Bidang Studi: Geopolitik dan Wawasan Nusantara", Lemhannas RI, Jakarta.
- Tirto.id. 2019. "Pemilu 2019: "Peneliti: Upaya Delegitimasi Pemilu Dilakukan Jauh Sebelum Coblosan".", <https://tirto.id/peneliti-upaya-delegitimasi-pemilu-dilakukan-jauh-sebelum-coblosan-dnbX>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.25 wib.
- Upaya Delegitimasi Pemilu Dilakukan Jauh Sebelum Coblosan".", <https://tirto.id/peneliti-upaya-delegitimasi-pemilu-dilakukan-jauh-sebelum-coblosan-dnbX>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.25 wib.

Endnotes

- 1 Eleanor Roosevelt, dikutip dari Brainy-Quote, https://www.brainyquote.com/quotes/eleanor_roosevelt_385439, diakses pada 12 Mei 2019, pukul 23.30 wib.
- 2 Eleanor Roosevelt adalah isteri dari Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat ke 32 yang terpilih sebanyak 4 kali, menjabat 1933-1945). Eleanor Roosevelt selain sebagai ibu negara, ia juga aktivis HAM pembela kelompok pekerja dan perempuan. Dikutip dari Kumparan, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/eleanor-roosevelt-dan-peran-wanita-abad-ke-20>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 01.48 wib.
- 3 Contoh berita terkait gonjang-ganjing Pemilu 2019: "Peneliti: Upaya Delegitimasi Pemilu Dilakukan Jauh Sebelum Coblosan", kutipan pendapat Wawan Mas'udi dalam Sarasehan Refleksi Pemilu di UGM Yogyakarta, <https://tirto.id/peneliti-upaya-delegitimasi-pemilu-dilakukan-jauh-sebelum-coblosan-dnbX>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.25 wib.
- 4 Contoh berita terkait Hoaks: "Mahfud MD: Banyak Kelirunya, Amien Rais dan Hashim Rusak Pikiran Masyarakat", <https://joglosemarnews.com/2019/04/mahfud-md-banyak-ke->

- lirunya-amien-rais-dan-hashim-rusak-pikiran-masyarakat/, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.39 wib.
- 5 Contoh berita terkait saling menyalahkan dan ujaran kebencian: Mahfud MD dalam ILC (8 Januari 2019), “Debat Capres 2019 : Menguji Netralitas KPU”, <https://www.youtube.com/watch?v=-8S6kuCXm7tw>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 02.56 wib.
 - 6 Bawaslu RI, “Indeks Kerawanan Pemilu 2019”, Bawaslu RI, Jakarta, 2018, https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU_IKP_2019.pdf, diakses pada 13 Mei 2019 pukul 22.33 wib.
 - 7 Div Humas Mabes Polri, “Analisa dan Evaluasi Pilkada 2018, Prediksi Indeks Potensi Kerawanan Pemilu dan Indeks Potensi Kerawanan Dapil Pemilu Tahun 2019”, <https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/jelang-pemilu-2019-rapim-polri-bahas-potensi-kerawanan-dan-pengamanan-menjelang-/2541720212523486/>, diakses pada 13 Mei 2019 pukul 22.37 wib.
 - 8 Nurrochman, mahasiswa program S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam “Setelah Pemilu 2019: Rekonsiliasi atau (Kembali) Polarisasi”, <https://news.detik.com/kolom/d-4519649/setelah-pemilu-2019-rekonsiliasi-atau-kembali-polarisasi>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 19.18 wib.
 - 9 Prof. Dr. Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI, dalam “Pilpres 2019: Terkoyak Kohesi Sosial”, <https://news.detik.com/kolom/d-4547358/pilpres-2019-terkoyaknya-kohesi-sosial>, diakses pada 13 Mei 2019, pukul 19.23 wib.
 - 10 Lebih jauh memahami Paradigma baca inti sari pemikiran Thomas Kuhn, Robert Friedrich, George Ritzer dalam Dani Vardiansyah, “Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar”, Indeks, Jakarta, 2008; Lono Lastoro Simatupang, “Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan”, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006; dan Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”, KBBI V iOS-1.4(15), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2018.
 - 11 ibid
 - 12 Pengertian Revitalisasi berdasarkan KBBI adalah proses, perbuatan menghidupkan atau menguatkan kembali. Kata Revitalisasi ini relevan dengan tindakan merevitalisasi yang maknanya agar lebih hidup dan lebih giat kembali. Dikutip dari Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”, KBBI V iOS-1.4(15), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2018
 - 13 Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara, “Bahan Ajar Bidang Studi: Geopolitik dan Wawasan Nusantara”, Lemhannas RI, Jakarta, 2019:h.160
 - 14 ibid
 - 15 Sifat sarwanusantara yaitu keberadaan bangsa Indonesia dan lingkungannya dalam kondisi terhubung, menyatu, dan diapit. ibid, h. 159, 162
 - 16 Arief Rachman, “Memahami Perbuatan Salah (Dalam Perspektif Pancasila)”, slide materi Pelatihan Mediasi Angkatan 103, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta, 2019
 - 17 Pengertian Dogmatis adalah bersifat

- mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Kata dasarnya adalah Dogma yang berarti pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan. Dikutip dari Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”, KBBI V iOS-1.4(15), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2018
- 18 Arief Rachman dan Andrea H Poeloen-gan, “Paradigma Keadilan Berdasarkan Pancasila (Pendekatan Restorative Justice)”, slide materi Pelatihan Mediasi Angkatan 66, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta, 2015
 - 19 Arief Rachman dan Andrea H Poeloen-gan, “Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Gerakan Pencerdasan Dan Penu-mbuan Generasi Berkarakter Pancasila”, slide materi Pelatihan Pengenalan Me-diasi Baharkam Polri, Pusat Mediasi Na-sional, Bogor, 2016
 - 20 Howard Zehr, “The Little Book of Re-storative Justice”, Good Books, New York, 2015: h.28-31
 - 21 Ibid